

SKRIPSI

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA
DENDA DI INDONESIA**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas**



Oleh :

IRSAL HABIBI

1510111052

Pembimbing

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.

Nelwitis, S.H., M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No. Registrasi: 12/PK IV/I/2019

KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA DENDA DI INDONESIA

(Irsal Habibi, 1510111052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 129 halaman, 2018)

ABSTRAK

Sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral yang selalu diperdebatkan dalam politik hukum pidana. Kebijakan penetapan sanksi pidana pada hakekatnya bertujuan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Melalui penetapan sanksi pidana diharapkan tercapai rasa keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat yang telah mengalami kerugian, sehingga diharapkan dapat dikembalikannya keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Peranan badan pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya (pidana) sangatlah penting sebagai serangkaian usaha untuk mengoperasionalkan sanksi pidana tersebut. Pidana denda sebagai sub sistem dari sanksi pidana selama ini belum optimal dioperasionalkan. Kebijakan legislatif terkait dengan sistem pidana denda menjadi salah satu faktor yang menghambat dapat dioperasionalkannya pidana denda. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana saat ini, optimalisasi pidana denda menjadi salah satu perhatian pembentuk undang-undang melalui kebijakan legislatifnya. Pidana denda dipandang sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang mempunyai banyak manfaat dibandingkan dengan jenis sanksi pidana yang lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia? 2) bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pengaturan pidana denda dalam Rancangan KUHP Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia, dirumuskan dalam empat pola yaitu pola perumusan secara alternatif, secara kumulasi, secara tunggal, dan secara kumulasi-alternatif, dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, tidak ada pola penjatuhan sanksi pidana denda yang sistematis dan tidak adanya sanksi pidana pengganti alternatif yang dapat mengoperasionalkan pidana denda secara optimal. 2) kebijakan legislatif terhadap sistem pidana Indonesia dalam Rancangan KUHP sebagai sistem hukum pidana Indonesia mendatang, menunjukkan pengaturan pidana denda yang lebih komprehensif, seperti pidana denda dapat menyesuaikan dengan perubahan nilai uang, pidana denda dibagi dalam beberapa kategori, dapat diupayakannya pengambilan harta kekayaan/pendapatan terpidana, dan pengaturan pidana pengganti denda yang lebih signifikan. Untuk perbaikan kedepannya, diharapkan kebijakan legislatif terhadap sistem pidana denda yang diakomodir dalam KUHP Nasional mendatang dapat diselaraskan dengan undang-undang pidana khusus (di luar KUHP).

LEGISLATIVE POLICY ON OPTIMIZATION OF FINE/AMERCEMENT PENALTY IN INDONESIA

(Irsal Habibi, 1510111052, Faculty of Law, Andalas University, 129 pages, 2018)

ABSTRACT

Criminal sanctions are one of the central problems that are always debated in the politics of criminal law. The policy of determining criminal sanctions is essentially aimed at overcoming crime. Through the establishment of criminal sanctions, a sense of justice is expected to be achieved for victims and their families and communities who have suffered losses, thus the balance in the community is restored. The role of the legislature in criminal law and its application (the penalty) is very important as a series of efforts to operationalize the amercement as penalty. Fine as a sub-system of criminal sanctions so far have not been optimally operationalized. Legislative policies related to the system of fines are one of the factors that prevent the operation of fine penalties from being operationalized. In the development of current criminal law, optimizing criminal penalties is one of the concerns of legislators through their legislative policies. Fine are seen as one type of penalties that has many benefits compared to other types of penalties. The problems in this thesis are: 1) how is the legislative policy regarding the regulation of fine penalty in the Indonesia criminal law system? 2) How is the legislative policy towards optimizing the regulation of fine penalty in the Draft of Indonesian Criminal Code? This research is a normative juridical method through the law approach, historical approach, and conceptual approach. The type of this research is descriptive by using secondary data. The results of the study show that 1) criminal penalties in the Indonesian criminal law system are formulated in four patterns, which are the pattern of alternative formulation, cumulatively, singularly, and cumulatively-alternative, in the current Indonesian criminal law system, there is no systematic fine penalty pattern and the absence of alternative criminal sanctions that can optimally administer criminal penalties. 2) legislative policies on the Indonesian criminal system in the Indonesian Criminal Code Draft as a future Indonesian criminal law system, shows a more comprehensive criminal regulation of fines, such as fine can adjust to changes in the value of money, criminal penalties divided into several categories, convicts, and more significant regulation for fine as substitute penalty. For future improvements, it is expected that the legislative policy towards the system of fines accommodated in the upcoming National Criminal Code can be harmonized with special criminal laws (outside the Criminal Code).